



Pengaruh Retribusi dan Pungli Terhadap Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah Di Kelurahan Sengeti Kabupaten Muaro Jambi

Jeki Boy Yuba¹, Elyanti Rosmanidar², Sri Rahma³

^{1,2,3} UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi,

Indonesia

*Corresponding author, email; jekiboyy@gmail.com, elyantirosmanidar@uinjambi.ac.id, sriahma@uinjambi.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:
Received Juni 2026
Revised Juni 2026
Accepted Juni 2026
Available online
<http://journal.uaindonesia.ac.id/index.php/JSE>

Keywords:
Levy, Illegal Levies, MSME Revenue, Micro, Small, and Medium Enterprises, Regional Economy.

Turabian style in citing this article: [citation Heading] Pengaruh Retribusi dan Pungli Terhadap Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah Di Kelurahan Sengeti Kabupaten Muaro Jambi" *Journal of Sharia Economics* 8, No. 1 June: 2026

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of levies and illegal levies (pungli) on the income of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Sengeti Village, Muaro Jambi Regency. MSMEs play a significant role in the regional economy, but in their implementation, they often face various cost burdens that can affect the level of business income, including regional levies and illegal levies. This study uses a quantitative approach with a survey method. Data were obtained by distributing questionnaires to 50 MSMEs who served as research respondents. The data analysis technique used was multiple linear regression analysis with the help of the SPSS application. The results of the study indicate that levies have a negative and significant effect on MSME income. This indicates that increasing the burden of levies can reduce the net income received by business actors. In addition, illegal levies also have a negative and significant effect on MSME income, even having a more dominant effect than levies. The results of the simultaneous test show that levies and illegal levies together have a significant effect on MSME income. This finding indicates that costs arising from official and unofficial levies can reduce business profits and affect the sustainability of MSMEs. Therefore, more effective levy management and strict oversight are needed to prevent illegal levies, thereby creating a conducive business climate, increasing MSME revenues, and supporting sustainable economic growth.

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sektor yang memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia. UMKM berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pengurangan tingkat kemiskinan, serta peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, UMKM terbukti memiliki daya tahan yang relatif kuat dalam menghadapi berbagai gejolak

ekonomi dibandingkan dengan usaha berskala besar (Tambunan, 2019). Oleh karena itu, pengembangan UMKM menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Keberadaan UMKM juga telah diakui secara yuridis melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang menegaskan pentingnya peran UMKM dalam pembangunan ekonomi nasional (Republik Indonesia, 2008).

Dalam menjalankan aktivitas usahanya, pelaku UMKM tidak terlepas dari berbagai kewajiban yang ditetapkan pemerintah daerah, salah satunya adalah pembayaran retribusi daerah. Retribusi merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang secara khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan individu atau badan usaha (Mardiasmo, 2021). Retribusi pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Apabila pengelolaannya dilakukan secara transparan dan proporsional, retribusi dapat memberikan manfaat berupa tersedianya fasilitas usaha yang lebih baik bagi pelaku UMKM (Marfuah & Hartiyah, 2019).

Namun demikian, besaran retribusi yang tidak sesuai dengan kemampuan ekonomi pelaku usaha dapat menambah biaya operasional dan berpotensi menurunkan pendapatan usaha. Dalam perspektif ekonomi mikro, setiap tambahan biaya produksi maupun biaya operasional akan memengaruhi tingkat keuntungan yang diperoleh pelaku usaha (Mankiw, 2021). Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi UMKM yang umumnya memiliki keterbatasan modal dan skala usaha yang relatif kecil. Oleh karena itu, kebijakan retribusi yang diterapkan pemerintah daerah perlu memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan ekonomi pelaku UMKM agar tidak menghambat perkembangan usaha mereka.

Selain kewajiban membayar retribusi resmi, pelaku UMKM juga sering menghadapi persoalan lain berupa praktik pungutan liar (pungli). Pungutan liar merupakan pungutan yang dilakukan oleh individu atau kelompok tertentu tanpa dasar hukum yang sah dan biasanya dilakukan dengan memanfaatkan posisi atau kewenangan tertentu untuk memperoleh keuntungan pribadi (Ramadhani, 2017). Praktik pungli tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi bagi masyarakat, tetapi juga menciptakan ketidakpastian dalam kegiatan usaha. Bagi pelaku UMKM, pungli menjadi beban tambahan yang harus ditanggung di luar biaya operasional resmi sehingga mengurangi pendapatan yang diperoleh dari aktivitas usaha mereka.

Fenomena pungli masih menjadi salah satu permasalahan yang sering ditemukan dalam aktivitas ekonomi masyarakat. Menurut Mahmudi (2015), pungli dapat menghambat efisiensi ekonomi karena menciptakan biaya transaksi yang tidak produktif. Selain itu, pungli juga berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah dan menciptakan iklim usaha yang tidak sehat. Dalam konteks UMKM, pungli dapat mengurangi kemampuan pelaku usaha untuk mengembangkan bisnisnya karena sebagian keuntungan yang diperoleh harus dialokasikan untuk memenuhi pungutan yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas.

Kelurahan Sengeti Kabupaten Muaro Jambi merupakan salah satu wilayah yang memiliki aktivitas UMKM yang cukup berkembang, terutama pada sektor perdagangan dan kuliner. Keberadaan UMKM di wilayah ini menjadi sumber pendapatan utama bagi sebagian masyarakat setempat. Akan tetapi, berdasarkan

fenomena yang terjadi di lapangan, para pelaku UMKM masih menghadapi berbagai kendala, termasuk kewajiban pembayaran retribusi dan adanya praktik pungutan liar yang dilakukan oleh oknum tertentu. Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat memengaruhi tingkat pendapatan usaha dan menghambat keberlangsungan kegiatan ekonomi masyarakat.

Secara teoritis, hubungan antara retribusi dan pendapatan UMKM dapat dijelaskan melalui teori biaya usaha yang menyatakan bahwa peningkatan biaya operasional akan memengaruhi keuntungan yang diterima pelaku usaha (Sukirno, 2019). Di sisi lain, pungutan liar merupakan biaya tambahan yang tidak memberikan manfaat ekonomi secara langsung sehingga cenderung lebih merugikan dibandingkan retribusi resmi. Dalam perspektif ekonomi kelembagaan, pungli termasuk biaya transaksi yang dapat mengurangi efisiensi pasar dan menurunkan produktivitas usaha (North, 1990).

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan adanya hubungan antara retribusi, pungutan liar, dan pendapatan UMKM. Penelitian Bramastuti (2009) menemukan bahwa retribusi yang tinggi berpengaruh negatif terhadap pendapatan usaha mikro karena meningkatkan beban operasional usaha. Sementara itu, penelitian Wahyudi dan Anwar (2018) menunjukkan bahwa pungutan liar memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap pendapatan pedagang UMKM karena menambah biaya usaha yang tidak terencana. Penelitian lain yang dilakukan oleh Yuliana et al. (2020) juga menemukan bahwa pungli memiliki pengaruh yang lebih besar dibandingkan retribusi terhadap penurunan pendapatan UMKM. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa baik retribusi maupun pungli merupakan faktor yang perlu diperhatikan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM.

Meskipun demikian, penelitian mengenai pengaruh retribusi dan pungutan liar terhadap pendapatan UMKM di Kelurahan Sengeti Kabupaten Muaro Jambi masih relatif terbatas. Setiap daerah memiliki karakteristik sosial, ekonomi, dan kebijakan yang berbeda sehingga hasil penelitian sebelumnya belum tentu dapat digeneralisasikan pada wilayah lain. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang secara khusus mengkaji pengaruh retribusi dan pungutan liar terhadap pendapatan UMKM di Kelurahan Sengeti guna memperoleh gambaran empiris yang lebih komprehensif.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh retribusi dan pungutan liar terhadap pendapatan UMKM di Kelurahan Sengeti Kabupaten Muaro Jambi. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam mendukung perkembangan UMKM serta memperkuat upaya pencegahan praktik pungutan liar sehingga tercipta lingkungan usaha yang lebih kondusif dan berkelanjutan.

KAJIAN TEORI

Teori Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan kegiatan usaha produktif yang dijalankan oleh perseorangan maupun badan usaha yang memenuhi kriteria tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian nasional karena

mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, UMKM terbukti lebih adaptif dalam menghadapi perubahan kondisi ekonomi dibandingkan usaha berskala besar. Keberadaan UMKM menjadi salah satu instrumen penting dalam pemerataan pembangunan ekonomi karena mampu menjangkau kelompok masyarakat menengah ke bawah dan memanfaatkan potensi ekonomi lokal.

Menurut Tambunan (2019), UMKM merupakan sektor ekonomi yang memiliki kontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja. Dalam perspektif ekonomi pembangunan, UMKM tidak hanya berfungsi sebagai pelaku ekonomi, tetapi juga sebagai sarana peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan rumah tangga. Oleh karena itu, pengembangan UMKM menjadi salah satu prioritas kebijakan pemerintah dalam memperkuat struktur ekonomi nasional.

Teori Pendapatan UMKM

Pendapatan merupakan sejumlah penerimaan yang diperoleh seseorang atau badan usaha dari aktivitas ekonomi yang dilakukannya dalam periode tertentu. Dalam konteks UMKM, pendapatan diperoleh dari hasil penjualan barang maupun jasa yang ditawarkan kepada konsumen. Pendapatan menjadi indikator utama keberhasilan usaha karena menunjukkan kemampuan pelaku usaha dalam menghasilkan keuntungan dan mempertahankan keberlangsungan usahanya.

Menurut Sukirno (2019), pendapatan usaha dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain modal usaha, lama usaha, jumlah tenaga kerja, tingkat pendidikan, dan lokasi usaha. Modal memungkinkan pelaku usaha meningkatkan kapasitas produksi, sedangkan pengalaman usaha membantu pelaku usaha memahami karakteristik pasar dan kebutuhan konsumen. Selain itu, lokasi usaha yang strategis dapat meningkatkan akses pasar sehingga berpengaruh terhadap peningkatan volume penjualan. Faktor-faktor tersebut saling berinteraksi dalam menentukan tingkat pendapatan yang diperoleh pelaku UMKM.

Adapun indikator pendapatan UMKM meliputi jumlah pendapatan per bulan, rata-rata pendapatan harian, jenis pekerjaan atau usaha, pendapatan tambahan dari sumber lain, serta tingkat kemampuan pendapatan dalam memenuhi kebutuhan hidup pelaku usaha dan keluarganya.

Teori Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang secara khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan individu maupun badan usaha. Berbeda dengan pajak, retribusi memiliki hubungan langsung dengan pelayanan yang diterima oleh masyarakat atau pelaku usaha. Dengan kata lain, pembayaran retribusi dilakukan sebagai imbalan atas fasilitas atau layanan yang diberikan pemerintah daerah.

Menurut Mardiasmo (2021), retribusi merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berfungsi mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Dalam konteks UMKM, retribusi dapat berupa retribusi pasar, kebersihan, perizinan usaha, parkir, dan berbagai layanan publik lainnya yang mendukung aktivitas usaha.

Secara teoritis, retribusi memiliki dua sisi pengaruh terhadap pendapatan

UMKM. Di satu sisi, retribusi menambah biaya operasional yang harus ditanggung pelaku usaha sehingga dapat mengurangi keuntungan yang diperoleh. Namun di sisi lain, apabila retribusi diimbangi dengan penyediaan fasilitas dan pelayanan yang memadai, maka keberadaan retribusi dapat meningkatkan kenyamanan usaha, memperluas akses pasar, dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan pelaku UMKM.

Teori Pungutan Liar (Pungli)

Pungutan liar atau pungli adalah segala bentuk pungutan yang dilakukan tanpa dasar hukum yang sah dan bertujuan memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Dalam praktiknya, pungli sering kali dilakukan melalui intimidasi, tekanan psikologis, atau penyalahgunaan kewenangan sehingga pihak yang menjadi sasaran merasa terpaksa untuk melakukan pembayaran.

Menurut Ramadhani (2017), pungli merupakan bentuk penyimpangan dalam pelayanan publik yang memiliki karakteristik tidak transparan, tidak memiliki dasar hukum, dan tidak memberikan manfaat langsung kepada pihak yang melakukan pembayaran. Oleh karena itu, pungli termasuk tindakan yang bertentangan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Dalam perspektif ekonomi, pungli merupakan biaya transaksi tambahan (*transaction cost*) yang bersifat tidak produktif. Pungli meningkatkan biaya operasional usaha tanpa memberikan nilai tambah terhadap proses produksi maupun pemasaran. Akibatnya, keuntungan yang diperoleh pelaku usaha menjadi berkurang dan daya saing usaha mengalami penurunan. Selain itu, pungli menciptakan ketidakpastian dalam aktivitas ekonomi karena pelaku usaha tidak dapat memperkirakan besaran biaya yang harus dikeluarkan secara pasti.

Teori Biaya Produksi dan Pendapatan

Teori biaya produksi menjelaskan bahwa setiap biaya yang dikeluarkan dalam proses usaha akan memengaruhi tingkat keuntungan yang diperoleh perusahaan. Menurut Mankiw (2021), laba usaha diperoleh dari selisih antara total penerimaan (*total revenue*) dan total biaya (*total cost*). Semakin besar biaya yang harus ditanggung pelaku usaha, maka semakin kecil keuntungan yang diperoleh apabila penerimaan tetap.

Dalam konteks penelitian ini, retribusi dan pungli dapat dikategorikan sebagai komponen biaya operasional usaha. Retribusi merupakan biaya resmi yang dikenakan pemerintah daerah, sedangkan pungli merupakan biaya tidak resmi yang tidak memiliki dasar hukum. Apabila kedua biaya tersebut meningkat, maka pendapatan bersih UMKM cenderung menurun karena sebagian penerimaan usaha harus dialokasikan untuk membayar biaya tersebut. Sebaliknya, apabila biaya dapat ditekan, maka keuntungan dan pendapatan usaha berpotensi meningkat.

Hubungan Retribusi terhadap Pendapatan UMKM

Hubungan antara retribusi dan pendapatan UMKM dapat dijelaskan melalui teori biaya usaha dan teori pelayanan publik. Retribusi yang terlalu tinggi dapat meningkatkan biaya operasional sehingga mengurangi keuntungan usaha. Namun, apabila retribusi digunakan untuk meningkatkan kualitas fasilitas dan pelayanan publik yang menunjang kegiatan usaha, maka dampaknya dapat menjadi positif terhadap pendapatan UMKM. Dengan demikian, pengaruh retribusi terhadap pendapatan sangat bergantung pada besaran tarif dan kualitas pelayanan yang diterima pelaku

usaha.

Hubungan Pungutan Liar terhadap Pendapatan UMKM

Pungutan liar memiliki hubungan negatif terhadap pendapatan UMKM karena menambah biaya yang tidak sah dan tidak memberikan manfaat ekonomi kepada pelaku usaha. Pungli mengurangi keuntungan usaha, meningkatkan ketidakpastian biaya, serta menurunkan daya saing UMKM di pasar. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi pungli yang harus dibayar pelaku usaha, maka semakin rendah tingkat pendapatan yang diperoleh

Perspektif Ekonomi Islam terhadap Retribusi dan Pungli

Dalam ekonomi Islam, setiap bentuk transaksi dan pungutan harus dilandasi prinsip keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*maslahah*), dan tidak mengandung unsur kezaliman (*zulm*). Retribusi yang ditetapkan pemerintah secara sah untuk kepentingan umum diperbolehkan selama tidak memberatkan masyarakat dan digunakan untuk kemaslahatan bersama. Sebaliknya, pungutan liar termasuk perbuatan yang dilarang karena mengandung unsur pengambilan harta orang lain secara batil sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 188.

Praktik pungli bertentangan dengan prinsip amanah dan keadilan dalam Islam karena memberikan keuntungan kepada pihak tertentu dengan merugikan pihak lain. Oleh karena itu, pemberantasan pungli tidak hanya menjadi tuntutan hukum positif, tetapi juga merupakan bagian dari implementasi nilai-nilai syariah dalam aktivitas ekonomi. Dengan terciptanya sistem ekonomi yang bebas dari pungli, pelaku UMKM dapat menjalankan usahanya secara lebih produktif, adil, dan berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif yang bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh retribusi dan pungutan liar (pungli) terhadap pendapatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kelurahan Sengeti Kabupaten Muaro Jambi. Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pengukuran hubungan antarvariabel yang dinyatakan dalam bentuk angka dan dianalisis menggunakan teknik statistik. Menurut Sugiyono (2023), penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu dengan tujuan menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini, variabel independen terdiri atas retribusi (X1) dan pungutan liar (X2), sedangkan variabel dependen adalah pendapatan UMKM (Y).

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pelaku UMKM yang beroperasi di Kelurahan Sengeti Kabupaten Muaro Jambi. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun kriteria responden meliputi pelaku UMKM yang telah menjalankan usaha minimal satu tahun, memiliki tempat usaha tetap, serta pernah melakukan pembayaran retribusi atau mengalami pungutan yang berkaitan dengan aktivitas usahanya. Berdasarkan kriteria tersebut, jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 50 responden yang dianggap mampu mewakili karakteristik populasi penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner, observasi, dan dokumentasi. Kuesioner disusun menggunakan skala Likert lima tingkat, yaitu sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Instrumen penelitian

digunakan untuk mengukur persepsi responden mengenai retribusi, pungutan liar, dan tingkat pendapatan usaha. Sebelum digunakan sebagai alat pengumpulan data, instrumen penelitian terlebih dahulu diuji validitas dan reliabilitasnya untuk memastikan bahwa setiap item pernyataan mampu mengukur variabel penelitian secara tepat dan konsisten. Selain data primer yang diperoleh dari responden, penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang berasal dari buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang relevan dengan penelitian.

Analisis data dilakukan menggunakan bantuan program Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). Tahapan analisis meliputi uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik yang terdiri atas uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas, serta analisis regresi linear berganda. Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji t untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial, uji F untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara simultan, serta uji koefisien determinasi (R^2) untuk mengetahui besarnya kontribusi variabel retribusi dan pungutan liar dalam menjelaskan variasi pendapatan UMKM. Seluruh pengujian dilakukan pada tingkat signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$) sebagai dasar dalam pengambilan keputusan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh retribusi dan pungutan liar (pungli) terhadap pendapatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kelurahan Sengeti Kabupaten Muaro Jambi. Data penelitian diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 50 pelaku UMKM yang dijadikan responden penelitian. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan aplikasi SPSS.

Karakteristik Responden

Berdasarkan hasil penelitian, karakteristik responden menunjukkan bahwa mayoritas pelaku UMKM di Kelurahan Sengeti bergerak pada sektor perdagangan dan kuliner. Sebanyak 56% responden berjenis kelamin laki-laki dan 44% perempuan. Dari segi usia, mayoritas responden berada pada rentang usia produktif yaitu 30–50 tahun. Berdasarkan lama usaha, sebagian besar responden telah menjalankan usahanya selama 5–10 tahun sehingga memiliki pengalaman yang cukup dalam mengelola usaha.

Dari sisi tingkat pendidikan, mayoritas responden merupakan lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA), sedangkan sebagian lainnya merupakan lulusan perguruan tinggi dan sekolah menengah pertama. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaku UMKM di Kelurahan Sengeti memiliki latar belakang pendidikan yang cukup beragam sehingga berpotensi memengaruhi kemampuan mereka dalam mengelola usaha.

Deskripsi Variabel Penelitian

Retribusi (X1)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM membayar retribusi secara rutin setiap bulan. Bentuk retribusi yang paling banyak dibayarkan meliputi retribusi kebersihan, retribusi tempat usaha, dan retribusi pasar. Berdasarkan hasil kuesioner, rata-rata responden menyatakan bahwa besaran retribusi masih dalam kategori sedang dan relatif dapat diterima karena berkaitan dengan penyediaan

fasilitas usaha oleh pemerintah daerah.

Pungutan Liar (X2)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian responden mengaku pernah mengalami praktik pungutan liar dalam menjalankan usahanya. Pungli umumnya berupa pungutan keamanan, biaya operasional tidak resmi, atau pungutan lain yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Sebagian besar responden menilai bahwa pungli merupakan beban tambahan yang merugikan karena tidak memberikan manfaat langsung terhadap kegiatan usaha.

Pendapatan UMKM (Y)

Pendapatan UMKM yang menjadi objek penelitian menunjukkan variasi yang cukup besar antar responden. Sebagian besar pelaku UMKM memperoleh pendapatan bersih antara Rp3.000.000 hingga Rp10.000.000 per bulan. Tingkat pendapatan tersebut dipengaruhi oleh jenis usaha, lama usaha, lokasi usaha, dan biaya operasional yang harus dikeluarkan.

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Berdasarkan hasil pengolahan data, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y=15,342-0,214X1-0,487X2+e$$

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa:

- 1) Nilai konstanta sebesar 15,342 menunjukkan bahwa apabila variabel retribusi dan pungli dianggap konstan, maka pendapatan UMKM memiliki nilai sebesar 15,342.
- 2) Koefisien regresi retribusi sebesar -0,214 menunjukkan bahwa setiap peningkatan retribusi sebesar satu satuan akan menurunkan pendapatan UMKM sebesar 0,214 satuan.
- 3) Koefisien regresi pungli sebesar -0,487 menunjukkan bahwa setiap peningkatan pungli sebesar satu satuan akan menurunkan pendapatan UMKM sebesar 0,487 satuan.

Uji t (Parsial)

Hasil uji t menunjukkan bahwa:

Variabel	t-hitung	Sig.	Keterangan
Retribusi (X1)	-2,318	0,025	Berpengaruh signifikan
Pungli (X2)	-4,856	0,000	Berpengaruh signifikan

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa nilai signifikansi retribusi sebesar 0,025 lebih kecil dari 0,05 sehingga retribusi berpengaruh signifikan terhadap pendapatan UMKM. Sementara itu, nilai signifikansi pungli sebesar 0,000 juga lebih kecil dari 0,05 sehingga pungli berpengaruh signifikan terhadap pendapatan UMKM.

Uji F (Simultan)

Hasil uji F menunjukkan nilai F-hitung sebesar 18,642 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel retribusi dan pungli secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan UMKM di Kelurahan Sengeti Kabupaten Muaro Jambi.

Koefisien Determinasi (R²)

Hasil analisis menunjukkan nilai Adjusted R Square sebesar 0,418. Hal ini berarti bahwa sebesar 41,8% variasi pendapatan UMKM dapat dijelaskan oleh variabel retribusi dan pungli, sedangkan sisanya sebesar 58,2% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian seperti modal usaha, jumlah pelanggan, lokasi usaha, pengalaman usaha, dan kondisi pasar.

Pembahasan

Pengaruh Retribusi terhadap Pendapatan UMKM

Hasil penelitian menunjukkan bahwa retribusi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pendapatan UMKM di Kelurahan Sengeti Kabupaten Muaro Jambi. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin besar retribusi yang harus dibayarkan oleh pelaku usaha, maka semakin kecil pendapatan bersih yang diperoleh.

Secara teoritis, hasil penelitian ini sejalan dengan teori biaya produksi yang menyatakan bahwa setiap tambahan biaya operasional akan mengurangi keuntungan usaha apabila tidak diimbangi dengan peningkatan penerimaan (Mankiw, 2021). Retribusi merupakan salah satu komponen biaya usaha yang wajib dibayarkan oleh pelaku UMKM sehingga secara langsung memengaruhi besarnya keuntungan yang diperoleh.

Meskipun demikian, pengaruh negatif retribusi yang ditemukan dalam penelitian ini relatif tidak terlalu besar dibandingkan pungli. Hal tersebut disebabkan karena retribusi merupakan pungutan resmi yang memiliki dasar hukum serta memberikan manfaat berupa penyediaan fasilitas usaha, kebersihan lingkungan, dan pelayanan publik lainnya. Dengan kata lain, pelaku UMKM masih dapat menerima keberadaan retribusi selama manfaat yang diterima sebanding dengan biaya yang dikeluarkan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Bramastuti (2009) yang menemukan bahwa retribusi memiliki pengaruh negatif terhadap pendapatan usaha mikro karena meningkatkan biaya operasional usaha. Semakin tinggi biaya yang harus dibayarkan pelaku usaha, semakin kecil pula keuntungan yang diperoleh.

Pengaruh Pungutan Liar terhadap Pendapatan UMKM

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pungutan liar berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pendapatan UMKM. Variabel pungli memiliki koefisien regresi yang lebih besar dibandingkan retribusi, sehingga dapat disimpulkan bahwa pungli merupakan faktor yang paling dominan memengaruhi penurunan pendapatan UMKM di Kelurahan Sengeti.

Temuan ini menunjukkan bahwa pungli menjadi beban tambahan yang sangat merugikan pelaku usaha karena tidak memberikan manfaat ekonomi secara langsung. Berbeda dengan retribusi yang digunakan untuk membiayai pelayanan publik, pungli hanya menguntungkan pihak tertentu dan menambah biaya operasional yang tidak terencana.

Dalam perspektif ekonomi kelembagaan, pungli termasuk biaya transaksi (transaction cost) yang tidak produktif sehingga dapat mengurangi efisiensi usaha (North, 1990). Semakin tinggi biaya transaksi yang harus ditanggung pelaku usaha, semakin rendah tingkat keuntungan yang dapat diperoleh. Akibatnya, pelaku UMKM memiliki keterbatasan dalam mengembangkan usahanya karena sebagian pendapatan digunakan untuk membayar pungutan yang tidak sah.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Wahyudi dan Anwar (2018) yang

menyimpulkan bahwa pungli berpengaruh negatif terhadap pendapatan pedagang kecil. Selain itu, penelitian Yuliana et al. (2020) juga menunjukkan bahwa pungli memiliki dampak yang lebih besar dibandingkan retribusi terhadap penurunan pendapatan UMKM.

Pengaruh Retribusi dan Pungli terhadap Pendapatan UMKM

Hasil uji simultan menunjukkan bahwa retribusi dan pungli secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pendapatan UMKM. Temuan ini menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut merupakan faktor penting yang memengaruhi kondisi ekonomi pelaku usaha di Kelurahan Sengeti.

Keberadaan retribusi sebagai pungutan resmi dan pungli sebagai pungutan tidak resmi sama-sama menambah biaya yang harus dikeluarkan oleh pelaku usaha. Apabila jumlah biaya yang harus dibayarkan semakin besar, maka pendapatan bersih yang diterima pelaku UMKM akan semakin berkurang. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang mampu menekan biaya usaha agar pelaku UMKM dapat berkembang secara optimal.

Dari perspektif ekonomi Islam, retribusi yang ditetapkan pemerintah secara sah diperbolehkan selama digunakan untuk kemaslahatan umum dan tidak memberatkan masyarakat. Sebaliknya, pungli merupakan praktik yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan larangan memakan harta orang lain secara batil sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 188. Oleh karena itu, pemberantasan pungli menjadi langkah penting dalam menciptakan iklim usaha yang sehat, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya meningkatkan pendapatan UMKM tidak hanya dapat dilakukan melalui peningkatan modal dan kapasitas usaha, tetapi juga melalui perbaikan tata kelola pelayanan publik, optimalisasi sistem retribusi daerah, dan pemberantasan praktik pungutan liar. Dengan demikian, pelaku UMKM dapat menjalankan usahanya secara lebih efisien, produktif, dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa retribusi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pendapatan UMKM di Kelurahan Sengeti Kabupaten Muaro Jambi. Semakin besar retribusi yang harus dibayarkan oleh pelaku usaha, maka semakin berkurang pendapatan bersih yang diperoleh. Meskipun demikian, pengaruh retribusi terhadap pendapatan UMKM relatif lebih kecil karena retribusi merupakan pungutan resmi yang memiliki dasar hukum dan umumnya disertai dengan penyediaan fasilitas maupun pelayanan publik yang mendukung aktivitas usaha. Oleh karena itu, pengelolaan retribusi yang transparan dan proporsional tetap diperlukan agar tidak menjadi beban yang berlebihan bagi pelaku UMKM.

Penelitian ini juga menemukan bahwa pungutan liar (pungli) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pendapatan UMKM. Pungli menjadi faktor yang paling dominan dalam menurunkan pendapatan pelaku usaha karena merupakan biaya tambahan yang tidak memiliki dasar hukum serta tidak memberikan manfaat ekonomi secara langsung. Keberadaan pungli menyebabkan meningkatnya biaya operasional usaha, menurunkan efisiensi usaha, dan mengurangi kemampuan pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya. Dengan demikian, praktik pungli menjadi salah

satu hambatan yang perlu mendapat perhatian serius dalam upaya meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM.

Secara simultan, retribusi dan pungli terbukti berpengaruh signifikan terhadap pendapatan UMKM di Kelurahan Sengeti Kabupaten Muaro Jambi. Temuan ini menunjukkan bahwa biaya yang timbul baik dari pungutan resmi maupun tidak resmi memiliki kontribusi terhadap perubahan tingkat pendapatan pelaku usaha. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu melakukan optimalisasi pengelolaan retribusi agar lebih efektif dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat, serta memperkuat pengawasan dan penegakan hukum untuk mencegah praktik pungutan liar. Langkah tersebut diharapkan dapat menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif, meningkatkan pendapatan UMKM, dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bramastuti, I. (2009). Pengaruh tingkat pendidikan, pendapatan, dan pengalaman kerja terhadap pendapatan usaha mikro kecil menengah. *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan*, 9(2), 45–56.
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 26* (10th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A. (2020). *Manajemen keuangan sektor publik: Problematika penerimaan dan pengeluaran pemerintah* (3rd ed.). Salemba Empat.
- Kuncoro, M. (2018). *Ekonomika pembangunan: Teori, masalah, dan kebijakan* (6th ed.). UPP STIM YKPN.
- Mahmudi. (2019). *Manajemen kinerja sektor publik* (4th ed.). UPP STIM YKPN.
- Mankiw, N. G. (2021). *Principles of economics* (9th ed.). Cengage Learning.
- Mardiasmo. (2021). *Perpajakan* (Edisi terbaru). Andi.
- Marfuah, S., & Hartiyah, S. (2019). Pengaruh modal sendiri, kredit usaha rakyat, teknologi, lama usaha, dan lokasi usaha terhadap pendapatan usaha. *Journal of Economic, Business and Engineering*, 1(1), 183–195.
- North, D. C. (1990). *Institutions, institutional change and economic performance*. Cambridge University Press.
- Ramadhani, W. (2017). Penegakan hukum dalam menanggulangi pungutan liar terhadap pelayanan publik. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 12(2), 263–276.
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (3rd ed.). Alfabeta.
- Sukirno, S. (2019). *Mikroekonomi teori pengantar* (3rd ed.). Rajawali Pers.
- Tambunan, T. T. H. (2019). *UMKM di Indonesia: Perkembangan, kendala, dan tantangan*. Kencana.
- Wahyudi, B., & Anwar, S. (2018). Dampak pungutan liar terhadap pendapatan pedagang UMKM di Jakarta. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 10(3), 110–120.

- Widarjono, A. (2020). *Analisis statistika multivariat terapan* (2nd ed.). UPP STIM YKPN.
- Yuliana, D., Firdaus, A., & Setiawan, M. (2020). Pengaruh retribusi dan pungutan liar terhadap pendapatan UMKM di Kota Semarang. *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, 14(4), 213–227.
- Yusuf, M., & Kurniawan, R. (2021). Analisis faktor-faktor yang memengaruhi pendapatan UMKM pada sektor perdagangan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 22(1), 55–68.
- Zulkarnain, A., & Hidayat, T. (2022). Pengaruh biaya operasional terhadap tingkat keuntungan usaha mikro dan kecil. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 24(2), 141–153.